OMBUDSMAN JATIM HIMBAU KEPALA DAERAH SEGERA TERBITKAN SK E-ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Jum'at, 16 Desember 2022 - Ilham Putra Hutama

SURABAYA (BM) - Perwakilan Ombudsman Jatim menghimbau agar seluruh kepala daerah di Jatim segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) e-alokasi penerima pupuk subsidi. Hal itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengenai maladministrasi pendataan penebusan pupuk subsidi menggunakan Kartu Tani yang dikeluarkan Ombudsman RI beberapa waktu lalu.

Agus Mutaqqin, Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim mengatakan, dari 38 Kota/Kabupaten di seluruh Jatim, hanya satu yang telah menerbitkan SK penerima pupuk subsidi yakni Kota Blitar. "Di Jawa Timur baru Kota Blitar yang sudah menyerahkan SK e-alokasi pupuk bersubsidi," ujarnya saat ditemui di kantornya, Kamis (15/12/2022).

Untuk menindaklanjuti percepatan pendataan penerima pupuk subsidi tersebut, Ombudsman Jatim telah menyurati seluruh kepala daerah di Jatim. "Tanggal 14 Desember kemarin kami telah menyurati 37 Kota/Kabupaten di seluruh Jatim terkait permintaan keterangan dan informasi seluruh Walikota/Bupati," katanya.

Dalam suratnya, kata Agus, Perwakilan Ombudsman Jatim mengundang seluruh kepala daerah dan kepala dinas pertanian di Jawa Timur untuk melakukan rapat bersama melalui zoom pada Jumat (16/12/2022) besok. "Dalam rapat zoom tersebut kami meminta seluruh Walikota/Bupati agar segera mengirimkan data e-alokasi pupuk subsidi. Kemudian data e-alokasi tersebut akan kami kirim ke Ombudsman RI. Dan nanti Ombudsman RI yang akan mengirim ke Kementerian Pertanian," jelasnya.

Agus mengatakan, Ombudsman Jatim belum mengetahui kendala apa saja yang dihadapi Kota/Kabupaten sehingga sampai saat ini belum menyerahkan e-alokasi pupuk subsidi ke Kementrian Pertanian. "Kami belum mengetahui ada kendala apa kok belum mengirim e-alokasi pupuk subsidi. Mudah-mudahan besok data e-alokasi sudah dikirim ke kami dan kami bisa kirim ke Ombudsman RI," katanya.

Agus menghimbau agar seluruh kepala daerah di seluruh Jatim untuk segera menerbitkan SK e-alokasi pupuk subsidi dan secepatnya mengirimkan ke Kementrian Pertanian. "Sehingga ada percepatan dan tidak ada hambatan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Jika ini tidak segera dilakukan, maka pasti petani yang menjadi rugi," tegasnya.

Ombudsman RI telah menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) dengan Nomor: 1001/IN/X/2022/JKT mengenai maladministrasi dalam pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani, pada 29 November 2022. Salah satu tindakan korektif dalam LAHP adalah terkait dengan percepatan penetapan data e-alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2023, dimana ketersediaan data e-alokasi menjadi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada program pupuk bersubsidi.

Data e-alokasi menjadi basis data yang akan digunakan oleh Pemerintah, HIMBARA, dan PT Pupuk Indonesia (Persero) dalam penyaluran pupuk bersubsidi pada 2023. Data e-alokasi memberikan informasi alokasi pupuk bersubsidi masing-masing petani dalam waktu satu tahun. Keterlambatan penetapan data e-alokasi akan berdampak terhadap tidak tepat waktu penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

Berdasarkan hasil monitoring pelaksanaan tindakan korektif sementara, Kementerian Pertanian memiliki hambatan dalam percepatan penetapan data e-alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023, karena sampai dengan saat ini masih banyak

Kabupaten/Kota yang belum menetapkan SK Bupati/Walikota tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023.

Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi tentang persiapan penyaluran pupuk bersubsidi TA 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota yang sudah melakukan input data e-alokasi dan menetapkan SK Bupati/Walikota tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun 2023 baru hanya 11 Kabupaten/Kota se-Indonesia. Seharusnya SK Bupati/Walikota tersebut ditetapkan paling lambat bulan November 2022, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. (arf/tit)